

R-21
20

DIPLOMASI PUBLIK

MEMENANGKAN HATI DAN PIKIRAN



Agus Trihartono
Abubakar Eby Hara
Fikry Zuledy Pamungkas

Diplomasi Publik

Memenangkan Hati dan Pikiran

karya Agus Trihartono, Abubakar Eby Hara, Fikry
Zuledy Pamungkas

Copyright © 2019, Agus Trihartono, Abubakar
Eby Hara, Fikry Zuledy Pamungkas

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penyunting: Redaksi Melvana
Desain Sampul: Melvana Design
Penata Isi: Melvana Design

Cetakan Pertama, Januari 2020

ISBN: 978-623-7439-15-8



Perumahan Batam
Jl. Batam Raya No. 8
Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua
Depok, Jawa Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	I
Asal Usul dan Makna Diplomasi Publik.....	3
Struktur Buku.....	8
BAB 2 DIPLOMASI.....	13
Perspektif Teori Diplomasi	13
Perkembangan Diplomasi.....	27
BAB 3 DIPLOMASI PUBLIK	47
Istilah Diplomasi Publik	47
Perkembangan Studi Diplomasi Publik	54
Pendekatan-pendekatan dalam Studi Diplomasi Publik	59
Penutup	67
BAB 4 DIPLOMASI BUDAYA	69
Diplomasi Kebudayaan: Lebih dari Misi Seni	71
Perjalanan Panjang Diplomasi Budaya.....	75
Kebudayaan sebagai Alat Diplomasi	80
Bagaimana Diplomasi Kebudayaan Diaplikasikan	84

Beberapa Catatan untuk Masa Depan	89
Penutup	92
BAB 5 PARADIPLOMASI	95
Sejarah dan Asal Usul	97
Kerangka Teoritis Paradiplomasi	102
Paradiplomasi di Indonesia	110
Penutup	112
BAB 6 DIPLOMASI ILMU PENGETAHUAN	115
Apa itu Diplomasi Ilmu Pengetahuan?	116
Diplomasi Ilmu Pengetahuan dalam Teori HI	119
Menjembatani Dunia melalui Sains	130
Penutup	135
KESIMPULAN	137
DAFTAR PUSTAKA	141
GLOSARIUM	150
INDEKS	153
TENTANG PENULIS	159

BAB I

PENDAHULUAN

Buku ini berangkat dari pemikiran tentang masih kurangnya buku yang membahas Diplomasi Publik (DP) di Indonesia. Beberapa tulisan tentang DP memang bisa ditemui di jurnal-jurnal dan laporan media Indonesia, namun belum ada yang ditulis secara komprehensif dalam sebuah buku. Sejauh ini kami melihat hanya ada tiga buku tentang diplomasi publik. Dua buku berusaha meninjau Diplomasi Publik, satu ditulis oleh akademisi (Rachmawati, 2018) dan satunya oleh praktisi (Basnur, 2018). Satu lagi buku membahas Diplomasi Publik Jepang (Effendi, 2011). Hal ini cukup memprihatinkan karena dalam perkembangan dunia dan dalam studi Hubungan Internasional (HI), DP merupakan salah satu andalan diplomasi yang sudah lama di dunia internasional. Apalagi dalam dunia yang dikuasai oleh teknologi digital, DP menjadi cara yang mudah untuk memperkenalkan dan meningkatkan citra bangsa dimata dunia internasional.

Salah satu alasan kurangnya perhatian pada DP adalah masih dominannya perspektif realis dalam studi Hubungan Internasional di Indonesia. Perhatian terhadap DP itu masih rendah karena umumnya para akademisi dan mahasiswa lebih terbiasa dan senang menganalisis masalah-masalah konflik, perang dan damai antar negara yang dianggap lebih *urgent* dan mengancam. Dunia yang masih sering bergolak di Timur Tengah, Asia Timur dan juga sebagian Eropa Timur menjadi ladang subur bagi kajian realisme dimana penggunaan senjata atau *hard power* masih dominan.

Sementara itu, kajian DP yang umumnya mengandalkan analisis tentang *soft power* dan bagaimana mempromosikannya sebagai bagian dari citra diri dan identitas ke dunia internasional, dalam dunia demikian, masih dipandang kurang relevan bahkan tidak berguna. Dengan kata lain kajian DP masih menempati posisi marjinal dalam studi HI di Indonesia.

Berangkat dari keresahan demikian buku ini mencoba memperkenalkan dan menguraikan apakah DP itu, bagaimana asal usulnya, bagaimana fungsinya dan mengapa studi terhadap DP perlu dilakukan. Sebagian dunia memang masih diliputi perang namun sebagian lain mulai meninggalkan perang dan bahkan semua negara berusaha untuk menampilkan citra dirinya yang baik dan pendukung perdamaian di dunia internasional. Bahkan negara-negara yang terlibat perang sekalipun, tetap menggunakan DP ke dunia. Mereka tanpa dirasakan oleh masyarakat internasional seolah-olah menampilkan citra dirinya yang baik dibalik topeng kerakusan untuk menguasai dunia.

yang spesifik. Paradiplomasi tidak menimbulkan masalah bila sejalan dengan diplomasi pusat, tetapi akan ada peninjauan bilamana ia melanggar otoritas pemerintah pusat. Kegiatan paradiplomasi misalnya menghasilkan *sister city* dan *province city*. Dalam level yang lebih tinggi, pemerintah-pemerintah daerah dari negara yang berbeda bisa bersatu untuk menggolkan kebijakan nasional misalnya tentang perubahan iklim yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Bab 6 membahas Diplomasi Ilmu Pengetahuan (DIP). Ini juga bagian dari Diplomasi Publik yang menempati posisi marjinal dalam diplomasi tradisional. Banyak orang sangat optimis bila DIP dilakukan, maka ia akan mengatasi pelbagai permasalahan manusia seperti kesehatan, kemiskinan, kekurangan air dan makanan. Hal ini dimungkinkan dalam dunia kosmpolitan dimana kepedulian orang tidak lagi pada negara tetapi pada kemanusiaan global. Dalam bab ini kami juga mengingatkan bahwa ada sisi negatif dari DIP ketika ia dijalankan oleh negara-negara untuk memperkuat teknologi persenjataan mereka yang makin hari makin canggih dan bisa memusnahkan seperti senjata nuklir. Selain itu DIP digunakan oleh negara-negara untuk tetap menguasai teknologi dengan misalnya memasukkan *International Property Right* (IPR) ke dalam kerangka perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tindakan itu akan terus membuat terjadinya disparitas antara negara maju dan negara berkembang.

Keseluruhan enam bab tulisan ini diharapkan akan membantu mahasiswa dan para peminat studi HI untuk memahami lebih lanjut peranan Diplomasi Publik dalam kegiatan internasional suatu negara. Diplomasi Publik menjadi bagian yang sangat penting karena kemajuan

teknologi komunikasi dimana masyarakat di negara lain mendapat informasi tentang negara kita dengan cepat. Mereka pun memberi reaksi bermacam-macam terhadap perkembangan di Indonesia dari yang radikal misalnya menolak satu kasus dengan melakukan demonstrasi sampai dengan yang mendukung. Keberhasilan menggunakan Diplomasi Publik akan meningkatkan *soft power* suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. DIP misalnya akan memperkuat *soft power* suatu negara di bidang pendidikan dan budaya. Negara itu akan menjadi rujukan dalam hal pengetahuan, meningkatkan potensi kerjasama dan mengundang para pakar dan penstudi untuk belajar di negara tersebut.

BAB 2

DIPLOMASI

I. PERSPEKTIF TEORI DIPLOMASI

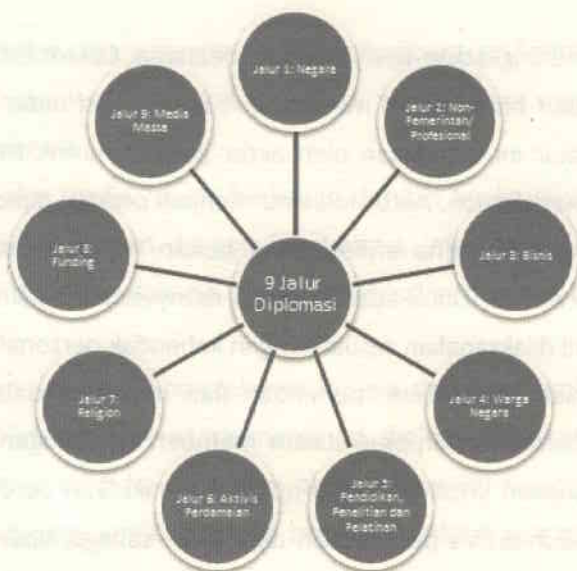
Praktik diplomasi jauh telah diteorikan sebelum perkembangan subbidang diplomasi itu sendiri dalam disiplin ilmu hubungan internasional (HI). Berteori dalam dunia akademis modern dipahami sebagai sistematisasi pemikiran, penjabaran akan sebuah gagasan dan prinsip yang luas untuk mengatur atau berusaha menjelaskan fenomena tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya berteori atau teorisasi tidak lantas kita sudah sampai pada sesuatu teori yang ideal, karena akan ada banyak pembaharuan-pembaharuan. Umumnya untuk teori pada awalnya tidak sistematis dan terpisah-pisah, yang diistilahkan oleh Paul Feyerabend (2010) sebagai *'anarchistic theory of knowledge'*. Semua pendekatan menurutnya dapat memberikan perspektif, wawasan dan cara telaah yang unik. Pada bagian ini akan dibahas tentang pelbagai sistematisasi pendisiplinan diplomasi yang terus berproses.

Pembahasan demikian diharapkan memperkaya narasi dalam kajian diplomasi. Walaupun harapan terhadap pembentukan *grand theory* (Skinner, 1990) dalam studi diplomasi adalah sulit, namun pembahasan ini mencoba untuk mengarah ke sana.

a. Praktik Diplomasi Awal

Hubungan antara praktik diplomasi dan teori diplomasi itu sendiri telah berlangsung jauh lama sebelum masa klasik ada. Hubungan tersebut terjadi pada hubungan internasional semasa Yunani Kuno (*Ancient Greek theoria*) yang dikutip dari tulisan Herodotus dan Plato. *Ancient Greek theoria* mengemban misi penting untuk berkonsultasi dengan *oracle* dan kedutaan *ecumenical* yang dikirim untuk melihat dunia luar dan mengamati ide-ide, nilai-nilai yang berkembang dan apa-apa yang dilakukan penduduk bumi lain. Cerita ini memuat praktik diplomasi dan penelaah pemikiran (komtemplasi) untuk membentuk titik awal bagi teori diplomasi. Hubungan antara keduanya telah tergambar meski belum begitu jelas, dimana praktik dan teori diplomasi saling bertautan satu sama lain. Ketidaklengkapan pengetahuan manusia yang coba dilengkapi dengan mencari pengetahuan ditempat lain menyebabkan adanya interaksi, negosiasi, antara makna, nilai dan pengetahuan.

Pada periode berikutnya terdapat tiga masa berbeda untuk menggambarkan perkembangan hubungan antara praktik dan teori diplomasi. Itu terdiri dari masa klasik, abad pertengahan dan modern. Dalam perkembangan ini, para pemikir diplomasi menguraikan pelbagai



Gambar 2.1 Sembilan Jalur Diplomasi

Jalur 1: Jalur ini berhubungan dengan diplomasi untuk mewujudkan perdamaian yang sifatnya resmi dan Negara/Pemerintahan menjadi aktornya. Para pemimpin negara atau perwakilannya melakukan praktik diplomasi pada jalur ini.

Jalur 2: Jalur non-pemerintah/profesional digunakan sebagai jalur diplomasi untuk mewujudkan perdamaian, penyelesaian konflik melalui para profesional. Biasanya diplomasi yang dilakukan dengan cara analisis, pencegahan, perundingan, dimana negara belum hadir atau memainkan peran disitu.

Jalur 3: Jalur untuk mewujudkan perdamaian melalui bisnis. Bisnis dengan peluang ekonomi dapat mengambil peranan dalam

- meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam taraf tertentu jalur bisnis dapat menjadi alat komunikasi antar negara.
- Jalur 4: Jalur ini digunakan oleh aktor individu untuk mewujudkan perdamaian. Aktor individu menjadi praktisi diplomasi tidak resmi, karena afiliasi yang bukan representatif institusi tertentu. Tidak adanya afiliasi menyebabkan jalur diplomasi ini dilaksanakan sesuai dengan kehendak personal itu sendiri.
- Jalur 5: Jalur pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam praktik diplomasi berperan dalam memberi sumbangan pemikiran bahkan kritik terhadap upaya mewujudkan perdamaian.
- Jalur 6: Jalur aktivis perdamaian digunakan sebagai upaya advokasi untuk mengatasi pelbagai permasalahan, seperti ekonomi, sosial, politik hingga lingkungan. Biasanya para aktivis ini menempatkan dirinya sebagai pelaku *check and balance* terhadap institusi pemerintahan supaya kebijakan yang diambil tetap dalam koridor prioritas kepada masyarakat.
- Jalur 7: Jalur kepercayaan atau agama (*religion*) membawa misi dalam perjuangan perdamaian serta keadilan. Aspek agama menjadi elemen penting dalam memberi pengaruh kepada para pemeluknya. Diplomasi jalur ini berusaha untuk memberikan pemahaman bagi para pemeluk agama untuk beragama dengan nilai-nilai yang luhur serta berperan dalam proses terciptanya perdamaian dunia.
- Jalur 8: Jalur *funding*/pendanaan merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dengan memberikan bantuan finansial. Biasanya pendanaan seperti ini digunakan untuk memperbaiki hubungan

BAB 3

DIPLOMASI

PUBLIK

I. ISTILAH DIPLOMASI PUBLIK

Istilah diplomasi publik telah lama ada bahkan sebelum konsep diplomasi publik dibuat. Istilah diplomasi publik pertama kali dipergunakan oleh *London Times* tahun 1856. Saat itu, istilah diplomasi publik digunakan untuk mengkritisi sikap Presiden Amerika Franklin Pierce. Dengan demikian ia dimaknai sebagai keterlibatan atau kritik oleh masyarakat (media) terhadap diplomasi pemerintah. Kemudian adapula penggunaan istilah diplomasi publik oleh *New York Times* pada tahun 1871 untuk menggambarkan pernyataan anggota Kongres Amerika Samuel S. Cox tentang diplomasi terbuka (*open diplomacy*).

Istilah diplomasi publik sering juga dikaitkan dengan pidato Presiden Woodrow Wilson yang bertajuk *Fourteen Points* tahun 1918. Dalam poin pertama pidatonya ia menggunakan istilah *open diplomacy*, yang menghimbau negara-negara di dunia untuk melakukan perundingan

dan diskusi secara transparan dan menghindari perundingan rahasia untuk menggalang aliansi dan koalisi untuk perang. Dalam pengertian diplomasi publik yang akan kita bahas pengertian diplomasi terbuka ini mempunyai makna lebih sempit. Diplomasi terbuka yang disarankan oleh Presiden Wilson adalah diplomasi yang negosiasi dan diskusinya diusahakan sebisa mungkin tidak meningkatkan permusuhan. Diplomasi terbuka juga terbuka untuk pengamat dan media.

Penggunaan istilah *open diplomacy* terus berlanjut pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dengan Uni Soviet dengan tujuan agar perundingan kedua blok itu lebih terbuka dan transparan. Namun selama Perang Dingin berlangsung, istilah yang dekat dengan diplomasi publik adalah *propaganda*, karena propaganda mengandung makna untuk meyakinkan publik di negara lain tentang kebenaran, kebaikan dan keperluan langkah-langkah dari satu blok untuk didukung dalam berhadapan dengan blok lainnya. Propaganda pada masa ini menjadi strategi yang esensial bagi kedua negara untuk memperoleh pengakuan sebagai negara adikuasa kala itu. Propaganda memiliki pemaknaan yakni penyebaran ide dan informasi untuk mengenalkan dan mendorong perilaku atau aksi tertentu (Minix & Hawley, 1997).

Dalam perkembangannya pada saat ini, istilah propaganda cenderung pada makna negatif. Hal tersebut terjadi karena banyak dari penggunaan propaganda didominasi dengan *framing* yang bertolakbelakang dengan fakta yang ada. Sehingga banyak dari propaganda digunakan untuk tujuan negatif, seperti menipu publik. Para *propagandist* berupaya menyampaikan informasi yang membuat *audience* percaya atau sepakat dengan ide atau tujuan si pembuat propaganda. Singkatnya, tujuan

pada kepentingan nasional karena kepentingan tidak bersifat alamiah. Ini dipengaruhi oleh tatanan internasional yang sifatnya berubah-ubah. Sehingga kepentingan nasional pun juga tidak bersifat permanen. Dan tujuan dari pendekatan konstruktivisme adalah berlangsungnya interaksi aktor melalui penyampaian pesan tertentu kepada aktor lain (mempengaruhi persepsi aktor lain).

Dialog menjadi cara utama yang digunakan oleh pendekatan-pendekatan yang dalam mengkaji DP. Menurut rasionalisme, penggunaan dialog dalam pendekatan DP dapat menumbuhkan rasa percaya antar kelompok. Menurut Cowen dan Arsenault, penggunaan dialog dapat menumbuhkan hubungan yang lebih baik karena setiap pihak yang terlibat merasa diterima dan terlibat atau menjadi bagian yang penting dari komunitas tersebut (Cowan & Arsenault, 2008). Selain dialog, monolog juga menjadi tumpuan lain karena negara perlu ruang sendiri dalam menyampaikan pesan dan imaji kepada negara lain. Kolaborasi antara monolog dan dialog sebagai cara atau metode yang digunakan dalam pendekatan rasionalisme. Sedangkan dalam pendekatan reflektivisme dan konstruktivisme keduanya menggunakan cara atau metode melalui dialog pemerintah dengan publik domestik maupun publik internasional. Selain itu, interaksi antar warga negara juga menjadi cara atau metode lain dalam pendekatan DP.

Perdebatan tentang aktor DP dapat dilihat melalui pendekatan rasionalisme dan pendekatan konstruktivisme. Rasionalisme masih menjadikan negara sebagai aktor utama meskipun tidak mengesampingkan munculnya aktor non-negara sebagai aktor lain dalam DP. Melissen menggunakan istilah *government driven* untuk

aktor non-negara yang berada dalam kerangka domestik negara yang hubungannya bersifat subordinan. Menurutnya, seberapa kuat apapun aktor non-negara, negara harus mampu untuk memegang kontrol utama dari setiap diplomasi yang dilakukan. Sedangkan pendekatan konstruktivisme melihat bahwa setiap aktor baik negara maupun non-negara keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek yang mempengaruhi tatanan internasional. Meski demikian, bagi Berridge misalnya, negara masih merupakan pemain utama dan koordinator dalam pelaksanaan DP. Hal ini mendapat tanggapan dari Ronfelt dan Arquila yang melihat bahwa adanya kemajuan teknologi informasi setidaknya telah membuat peran negara dalam DP mulai menurun. Menurutnya kekuatan informasi menjadi penting bagi DP. Yang terpenting bagi para aktor adalah bagaimana dapat menguasai jalur informasi dan menjadikannya sebagai alat untuk menyampaikan pesan, ide dan *image* yang hendak di diplomasikan ke *audience* di luar negara. Bagi Ronfelt dan Arquila, dalam DP perlu adanya kerja sama yang melibatkan aktor non-negara. Dalam hal ini kepentingan nasional sebagai tujuan yang statis bagi negara akhirnya bukan lagi menjadi tujuan satu-satunya.

4. PENUTUP

DP mencoba mempengaruhi pikiran serta memobilisasi tindakan untuk menarik minat pihak lain akan nilai-nilai mulia yang dimiliki suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut negara perlu membuka diri untuk bekerja sama dengan dunia asing. Sedangkan perkembangan studi DP dapat dilihat dari bagaimana praktiknya di Amerika Serikat

BAB 4

DIPLOMASI

BUDAYA

Di bagian ini kita akan memberikan perhatian kepada diplomasi kebudayaan atau juga dikenal sebagai diplomasi budaya. Diplomasi budaya sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan bisa jadi, seperti akan dijelaskan di bagian lain, termasuk diplomasi yang sama tuanya dengan peradaban manusia modern. Diplomasi budaya, dalam bentuknya yang paling sederhana, sudah ada dan bahkan sudah memberikan sumbangan bagi hubungan antar manusia, antar kelompok masyarakat, maupun antar negara.

Perhatian yang besar kepada diplomasi budaya sebagai sebuah studi serius agaknya baru muncul belakangan. Selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2014, potensi hubungan budaya dan diplomasi budaya pada peningkatan hubungan internasional mendapatkan perhatian besar di pelbagai belahan dunia. Menariknya, atau justru ironisnya, minat yang besar pada pengembangan diplomasi

budaya terjadi pada saat dunia dijangkiti penguatan politik identitas, populisme, dan nasionalisme sempit. Munculnya tiga aspek terakhir telah memiliki dampak pada berkurangnya ruang yang bisa digunakan untuk peningkatan kualitas hubungan internasional saat ini. Namun pada saat yang sama, era terkini justru semakin menempatkan pentingnya komunikasi antar budaya bagi penguatan saling pengertian secara kolektif. Dengan kata lain, gairah besar penggunaan diplomasi budaya, memproyeksikan budaya dan hubungan budaya melewati batas-batas negara, menjadi vital karena dunia sedang berhadapan dengan eskalasi sentimen populisme dan politik identitas. Kebutuhan bagi penerapan diplomasi budaya memperoleh rasionalitas yang valid.

Pada bagian ini, secara sekilas kita akan melihat bagaimana signifikansi diplomasi budaya dalam perkembangan hubungan internasional mutakhir serta bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pada bagian pertama akan dibahas apa itu diplomasi kebudayaan serta beberapa kontestasi teoritik yang menyertainya. Bagian kedua akan melihat mengapa diplomasi kebudayaan itu penting dan karenanya mulai mendapatkan perhatian yang relatif besar. Pada bagian ketiga, kita akan melihat bentuk-bentuk diplomasi kebudayaan di luar asumsi selama ini yang secara awam selalu dikaitkan dengan pertukaran dan muhibah kesenian seperti tari-tarian (*dances*) maupun pertunjukan. Terakhir, tulisan ini akan melihat tantangan implementasi diplomasi kebudayaan sehingga kita dapat melakukan identifikasi kira-kira jalan seperti apa yang mungkin akan dilalui oleh diplomasi kebudayaan untuk tetap bisa eksis dan efektif. Ulasan berikut ini ingin menunjukkan beberapa indikasi tersebut. Pada bab ini dalam banyak penjelasannya bersandar

globalisasi. Perlu dicatat pendapat Christian Fuchs (2019) “teknologi-teknologi digital telah secara radikal mentransformasikan dunia, menjanjikan bentuk-bentuk komunitas yang baru, cara-cara alternatif untuk mengetahui dan merasakan, inovasi kreatif, kultur partisipatif, aktivisme berjejaring, dan persemaian demokrasi”. Oleh karena itu, pendekatan diplomasi budaya perlu memikirkan perkembangan di sisi ini. Perilaku masyarakat yang terkait dengan dahsyatnya pembangunan teknologi terus meningkat.

Keempat, estimasi bahwa Asia akan menjadi *epicentral* ekonomi dunia. Perkembangan kemajuan ekonomi akan menuju Asia dan menempatkan Asia menjadi wilayah paling menarik secara ekonomi di masa depan. Kebangkitan ekonomi Asia bisa jadi akan diikuti oleh kebangkitan popularitas budaya Asia. dalam konteks ini, sangat mungkin perkembangan diplomasi budaya di masa depan akan mengikuti citra Asia. Dengan kata lain, Asia akan menjadi jangkar baru mode dan cita rasa diplomasi budaya di masa mendatang.

6. PENUTUP

Kajian diplomasi budaya terkini semakin keluar dari cara pandang konvensional mengenai bagaimana diplomasi ini diaplikasikan. Segala sesuatu yang menjadi elemen budaya menjadi sumber-sumber kreatif yang dapat meningkatkan saling memahami di dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan antar negara.

Diplomasi budaya berada dalam semakin luasnya sumber-sumber konten diplomasi dan saluran-saluran yang semakin terbuka akibat globalisasi dan konektifitas yang tinggi dengan teknologi (internet dan

smartphone). Realitas ini memiliki keuntungan bagi semakin mudahnya aplikasi diplomasi budaya. Namun, pada saat yang sama memiliki tantangan yang sangat besar apalagi terkait dengan menguatnya politik identitas dan *xenophobia* di masyarakat. Bab ini telah mengidentifikasi beberapa persoalan dalam aplikasi diplomasi budaya baik dalam ranah teoritik maupun praktisnya. Menemukan langkah yang terkoneksi dengan perkembangan teknologi yang dahsyat dalam meniasati perubahan masyarakat yang sangat cepat dan global ini, menempatkan diplomasi budaya dapat menjadi instrumen bagi timbulnya keanekaragaman secara harmonis. Namun, tanpa inovasi dalam aplikasinya, diplomasi budaya bisa kehilangan daya tariknya.

BAB 5

PARADIPLOMASI

Secara umum paradiplomasi diartikan sebagai aktivitas dari daerah terutama daerah otonom, negara bagian, kabupaten atau kota di suatu negara dalam kegiatan diplomasi dengan daerah atau kota sejenis di negara lain. Dengan kata lain ia dilakukan oleh aktor-aktor di daerah apakah itu provinsi, kabupaten atau kota. Aktivitas itu lebih sederhana daripada aktivitas diplomasi yang selama ini dilakukan oleh negara yang melibatkan diplomasi tingkat tinggi dan kadang-kadang berkaitan dengan *high politics*. Daerah-daerah ini melakukan negosiasi, promosi, dialog dan kadang kala membuat perjanjian kerja sama untuk memajukan kepentingan yang lebih sempit menyangkut kebutuhan daerahnya. Wilayah diplomasi mereka sering menyangkut wilayah *low politics*.

Paradiplomasi dimasukkan sebagai bagian dari DP terutama karena kegiatannya secara langsung maupun tidak seringkali melibatkan

masyarakat yang luas. Ia umumnya memang dilakukan oleh para elit di daerah, tetapi dalam prosesnya, dorongan dan potensi masyarakatlah yang memungkinkan paradiplomasi. Namun kadangkala organisasi-organisasi daerah juga bisa melakukan paradiplomasi kebudayaan misalnya dengan mengirim tim kesenian ke negara lain. Kerja sama yang dibangun melalui paradiplomasi digunakan secara umum untuk tujuan membangun daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan tukar-menukar pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi pelbagai masalah di kota seperti sampah. Potensi-potensi yang ada pada daerah apakah objek pariwisata, industri kreatif, industri makanan, budaya lokal dan kuliner adalah kekuatan atau *soft power* yang menjadi modal atau instrumen bagi paradiplomasi.

Berbeda dengan diplomasi antar negara, daerah-daerah ini tidak dapat membuat perundingan internasional dan mewakili negaranya dalam forum internasional yang syarat keanggotaannya adalah negara berdaulat penuh. Tiap wilayah juga kadangkala mempunyai sumber daya yang terbatas. Mereka juga tetap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menegosiasikan kepentingan daerah mereka. Hanya dalam hal tertentu mereka melakukan paradiplomasi. Tentu saja ada aspek positif dan menguntungkan dalam kegiatan demikian. Keuntungannya adalah beban diplomasi pusat atau nasional bisa dikurangi. Walau demikian ada aspek negatifnya yaitu komplikasi yang ditimbulkan dalam negosiasi di level internasional karena semakin banyaknya aktor politik luar negeri. Kemudian juga terdapat kesulitan dalam perumusan politik luar negeri suatu negara karena adanya pelbagai pemain politik luar negeri (Lequesne & Paquin, 2017).

perbatasan mendapat manfaat melalui misalnya zona perdagangan bebas. Kemudian ini juga berkaitan dengan kemudahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hubungan dengan pemerintah daerah sehingga mereka mempunyai keleluasan untuk mencari sumber ekonomi baru. Untuk beberapa daerah di Indonesia seperti Banyuwangi yang giat promosi ke luar negeri ini juga berkaitan dengan kreativitas dan inovasi para pimpinannya.

Kegiatan paradiplomasi juga merupakan DP yang menuntut dukungan partisipasi masyarakat yang luas. Daerah misalnya memiliki potensi pariwisata yang baik berupa unsur budaya dan wisata alam, kemudian ia dikemas dengan cara yang baik untuk dipromosikan. Promosi itu dilakukan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Ini misalnya yang dilakukan oleh Banyuwangi dengan konsep "*Banyuwangi Sunrise of Java*". Pelbagai kegiatan diciptakan untuk tujuan itu terutama festival yang mengangkat budaya dan produk makanan minuman tradisional yang berlangsung sepanjang tahun. Banyuwangi juga meniru promosi wisata *Tour de Langkawi* dengan mengadakan *Tour de Banyuwangi* yang mengundang para pembalap sepeda terkenal di luar negeri dan mengkaitkan itu dengan program tour sepeda internasional.

4. PENUTUP

Paradiplomasi merupakan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh daerah atau pemerintahan sub-nasional dengan daerah di negara lain. Kegiatan ini berkaitan dengan DP karena melibatkan masyarakat secara luas dalam beberapa bidang baik ekonomi, pendidikan maupun

pariwisata. Dalam konteks teoritik ilmu hubungan internasional, paradiplomasi dapat menjadi bagian dari politik luar negeri suatu negara, yang dilakukan atau diwakilkan oleh salah satu wilayah. Kebijakan itu bisa mempengaruhi kebijakan nasional terutama untuk lebih mendinamisir hubungan dua negara. Hubungan-hubungan yang banyak ini secara teoritik dapat mencegah terjadinya konflik atau perang yang serius antara dua negara. Ketergantungan dan kekhawatiran bahwa kerja sama antar daerah yang telah dibangun dengan baik itu akan terganggu bila terjadi konflik bisa menjadi penghalang bagi berlanjutnya konflik antara dua negara.

Sejauh ini kajian yang berkembang banyak melihat aspek-aspek teknis kerja sama dan bagaimana paradiplomasi dapat dilakukan secara lebih baik. Masih sedikit kajian yang memfokuskan bagaimana paradiplomasi itu sendiri misalnya telah menjadi salah satu tren di daerah-daerah dan bagaimana daerah bisa mendesain kota yang menarik sehingga misalnya mengundang pihak lain untuk melakukan kerja sama. Suatu kota bisa saja mempunyai aktivitas yang baik namun bila tidak diikuti dengan kegiatan *branding* yang kuat misalnya ia tidak mempunyai daya tarik untuk menarik kerja sama dengan negara lain. Kota-kota yang khas dan berkarakter bukan lah kota yang muncul dengan sendirinya tetapi ia tercipta melalui proses sejarah yang panjang.

BAB 6

DIPLOMASI ILMU PENGETAHUAN

Secara umum diplomasi ilmu pengetahuan (*science diplomacy*) sering dianggap mempunyai tujuan yang baik dan positif untuk membangun kerja sama atau kemitraan dalam level antar negara, regional maupun level global melalui kerja sama di bidang ilmu pengetahuan. Bidang-bidang kerja sama bisa menyangkut bidang pembangunan, teknik dan rekayasa atau bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya (Copeland, 2015). Namun dalam prakteknya Ilmu Pengetahuan (IP) dan juga teknologi yang mulanya hal yang netral, ketika sampai ditangan para penguasa, tidak dapat dipungkiri, maka ia bisa jadi akan sangat berbahaya.

Bab ini karena itu akan mencoba membahas dua sisi dari IP di atas yang dalam diplomasi hubungan antar bangsa mempunyai sisi positifnya dan sisi negatifnya. Namun sebelum itu, perlu dicatat di sini bahwa apapun bentuknya, sejak awal diplomasi ilmu pengetahuan

(DIP) tidak menempati bagian yang signifikan dalam diplomasi antar bangsa. Walaupun ilmu pengetahuan penting untuk mengatasi pelbagai masalah kemanusiaan, teknologi, kesehatan dan lingkungan dunia, namun DIP tidak mendapatkan tempat semestinya dalam diplomasi. Ia memiliki tempat marginal terkalahkan oleh *hard diplomacy* seperti diplomasi perang dan damai.

Bab ini berusaha meguraikan pentingnya DIP dan bagaimana kita bisa mengefektifkan kerja sama dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu bab ini juga mencoba melihat pelbagai permasalahan yang muncul dalam dalam DIP. Bab ini dibagi dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama akan dibahas apakah yang dimaksud DIP. Pada bagian kedua akan dibahas posisinya DIP dalam Studi Hubungan Internasional (HI). Pada bagian ketiga akan dibahas peluang dan tantangan yang dihadapi DIP untuk menjadi jembatan bagi perbaikan kemanusiaan.

I. APA ITU DIPLOMASI ILMU PENGETAHUAN?

DIP secara sederhana mempunyai pengertian diplomasi yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. Tidak seperti diplomasi lain, ungkapan 'diplomasi sains' (atau DIP) adalah istilah yang relatif baru dan asing, dan konsensus mengenai definisinya belum ada. Nina Fedoroff, Penasihat Sains untuk mantan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menggambarkan DIP sebagai: 'penggunaan kolaborasi ilmiah antar bangsa untuk mengatasi masalah umum yang dihadapi umat manusia abad ke-21 dan untuk membangun kemitraan internasional yang konstruktif'. Umumnya DIP menyangkut tiga bidang tujuan berbeda: menginformasikan tujuan

proses konsultasi ini. Pada Juli 2014, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum (OWG) PBB mengusulkan dokumen yang berisi 17 tujuan untuk diajukan untuk persetujuan Majelis Umum pada bulan September 2015. Dokumen ini menjadi dasar bagi SDGs baru dan agenda pembangunan global yang mencakup mulai tahun 2015 -2030 (UN SDG, 2012).

Dalam konteks ini, pelbagai negara, terutama kementerian luar negeri perlu memberikan penekanan yang lebih besar pada sains dalam strategi mereka, dan menarik lebih banyak saran akademik dalam pembentukan dan penyampaian kebijakan. Ini merupakan bagian dari diplomasi publik dimana pesan akan kerja sama ini tersampaikan ke publik terutama di negara yang terkait dengan kerja sama. Perlu juga diadakan kegiatan seperti *academic exchange*, dan promosi kerja sama dan melakukan pelbagai penelitian bersama yang umumnya dirintis oleh negara-negara maju dengan target negara-negara berkembang.

Para saintis bisa membantu pembentukan nilai-nilai ilmiah dari rasionalitas, transparansi dan universalitas sama di seluruh dunia. Mereka bisa membantu mendukung tata pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan antar negara. Karena sifat ilmu yang non-ideologis, maka pertukaran ilmu dan ide bisa bebas antar orang terlepas dari budaya, latar belakang nasional atau agama. Komunitas ilmiah sering bisa bekerja sama di luar batas nasional untuk membahas kepentingan keilmuan bersama untuk mencari solusi suatu permasalahan baik sosial maupun politik. Pemerintah juga memberikan kemudahan terhadap visa untuk para ilmuwan dan cendekiawan. Asosiasi keilmuan internasional dalam pelbagai bidang seperti *American Political Science Association* (APSA) dan *Asian Political Science Association* (APISA) memiliki

peran penting dalam memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah-masalah ini. Selain itu mereka memainkan peran di jalur dua diplomasi melengkapi peranan pemerintah dalam diplomasi jalur satu.

4. PENUTUP

Berbeda dengan ekspektasi yang optimistik bahwa DIP akan membawa kerja sama yang lebih baik antar negara, bab ini melihat persoalan yang lebih kompleks. Memang harus diakui bahwa DIP memberikan kontribusi besar untuk diplomasi (*science for diplomacy*), namun dalam praktek DIP, ia bisa menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi DIP akan memberikan kontribusi pada perdamaian khususnya penyelesaian pelbagai persoalan sosial, pembangunan dan kesehatan. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi kekuatan yang menopang diplomasi untuk mencapai tujuan militeristik suatu negara.

Bila dalam hal pertama kita melihat DIP sejalan dengan perkembangan global untuk membangun peradaban baru yang damai, dalam hal kedua, IP menjadi alat diplomasi justru untuk memperkuat kekuasaan satu negara atas yang lainnya. Kekuasaan tidak hanya ditentukan dengan kepemilikan senjata. Tetapi pada saat ini juga ditentukan oleh kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Bahkan dengan memasukkan ilmu pengetahuan ke perjanjian WTO dengan apa yang dikenal dengan TRIPs, maka kekuasaan Barat dan AS atas dunia ketiga bukan hanya diperkuat tetapi dilanggengkan.

Tidak ada cara yang ampuh untuk mengatasi lingkaran setan ini kecuali berharap pada kesadaran global bahwa Ilmu Pengetahuan

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini kami mencoba merefleksikan apa yang sudah ditulis di bab-bab sebelumnya. Diplomasi pada prinsipnya adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan antara dua atau lebih negara melalui perundingan. Dalam bentuknya yang tradisional ini, diplomasi dilakukan dalam forum dan konferensi internasional untuk mengakhiri perang atau bahkan mencegah perang yang dilakukan oleh para diplomat yang secara resmi mewakili negara. Dalam perkembangannya upaya untuk mencegah perang itu dilakukan melalui banyak jalur atau yang disebut dengan *multitrack diplomacy*.

Kemudian dalam dunia yang makin kompleks, diplomasi mengenal istilah diplomasi publik yang juga dikenal dengan nama diplomasi rakyat. Diplomasi ini disebut demikian karena melibatkan publik baik di negara target maupun di negara sendiri. Walaupun tujuannya sama dengan diplomasi awal yakni membangun dialog agar kerja sama

dan perdamain tercipta, hakekat diplomasi publik berbeda dengan diplomasi klasik.

Diplomasi Publik (DP) merupakan diplomasi yang ditargetkan ke masyarakat di negara lain untuk memenangkan hati dan pikiran mereka. Para era teknologi digital saat ini DP menjadi lebih penting lagi karena informasi dan komunikasi sangat terbuka dan cepat tersebar luas. Yang dihadapi dalam politik luar negeri bukan lagi hanya pemerintah negara lain tetapi juga masyarakat atau publiknya. Mereka ini menjadi kekuatan baru yang bisa positif atau negatif terhadap pemerintah kita. Kemenangan dalam perang seperti yang dicapai AS di Iraq misalnya tidak serta merta menjadikan negara ini diterima di sana. Resistensi terhadap kehadiran AS semakin menguat. Ini banyak dipandang oleh pengamat sebagai kegagalan DP AS di Timur Tengah. Sebagai misal TV AS yang beroperasi di sana Al Hurra tidak berhasil menandingi pemberitaan Al Jazeera (P. Seib, 2009).

Pada sisi lain DP bisa menjadikan publik di negara lain *favorable* terhadap negeri kita dalam bidang-bidang tertentu. Walaupun banyak orang tidak suka kepada Amerika di Indonesia, tetapi DP AS berhasil dalam hal budaya, pendidikan dan sistem pemerintahan, dimana banyak orang Indonesia menjadikannya acuan. Pada saat ini budaya pop Korea (K-Pop) *booming* di Indonesia dan menjadi industri yang sangat menguntungkan bagi negara itu. Makanan Korea dan Jepang juga banyak di Indonesia dan orang merasa senang untuk pergi makan di sana.

Aktor dalam DP tidak mesti negara tetapi bisa juga aktor-aktor non negara. Negara kadang menjadi fasilitator bagi masyarakat, perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Aldecoa, F., & Keating, M. (1999). *Paradiplomacy in action : the foreign relations of subnational governments*. F. Cass.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis*.
- Anderson, G. C. (1993). *Managing performance appraisal systems*. Blackwell Business.
- Archibugi, D., & Filippetti, A. (2010). The Globalisation of Intellectual Property Rights: Four Learned Lessons and Four Theses. *Global Policy*, 1(2), 137–149. <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2010.00019.x>
- Basnur, A. B. (2018). *Diplomasi publik : catatan, inspirasi dan harapan*.
- Berridge, G. R. (2015). Public Diplomacy. In *Diplomacy* (pp. 198–209). London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137445520_14

- Boesche, R. (2002). *The First Great Political Realist: Kautilya and His Arthashastra* - Roger Boesche - Google Buku. Lexington Book (1st ed.). Maryland: Lexington Book.
- Bound, K., Briggs, R. and, & Holden, J. (2007). *Cultural Diplomacy: Culture is a central component of international relations. It's time to unlock its full potential*. DEMOS (1st ed.). London: DEMOS.
- Burchill, S. (2009). *Theories of international relations* (5th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Burt, R., Robison, O., & Fulton, B. (1998). *Reinventing diplomacy in the information age : a report of the CSIS Advisory Panel on Diplomacy in the Information Age*. CSIS.
- Callières, M. de (François). (1994). *The art of diplomacy*. University Press of America.
- Chaloux, A. (2017). The Implementation of the Western Climate Initiative: How North American States and Provinces Lead International Climate Negotiations. *International Negotiation*, 22(2), 239–258.
- Chandler, D., & Fuchs, C. (2019). *Digital objects, Digital Subjects : Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data* (1st ed.). London: University of Westminster Press.
- Cicero, M. (1913). *Cicero De officiis* (1st ed.). Cambridge: Harvard U.P.
- Claude, I. L. (1971). *Swords into plowshares; the problems and progress of international organization* (3rd ed.). New York: Random House.
- Constantinou, C. M. (2006). On Homo-Diplomacy. *Space and Culture*, 9(4), 351–364. <https://doi.org/10.1177/1206331206290135>

- Copeland, D. (2015). Bridging the Chasm | Science & Diplomacy. Retrieved from <http://www.sciencediplomacy.org/perspective/2015/bridging-chasm>
- Copeland, D. (2016). Science Diplomacy. In R. Constantinou, Costas M; Kerrr, Pauline; Thakur (Ed.), *The SAGE Handbook of Diplomacy* (pp. 628–642). 55 City Road: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781473957930>
- Cowan, G., & Arsenault, A. (2008). Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 10–30. <https://doi.org/10.1177/0002716207311863>
- Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy before Gullion. <https://doi.org/10.4324/9780203891520.ch3>
- Cummings, M. C. (2009). Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. Washington: Americans for the Arts.
- d'Hooghe, I. (2010). The Limits of China's Soft Power in Europe: Beijing's Public Diplomacy Puzzle. Hague: Clingendael Diplomacy Papers.
- Der Derian, J. (1987). *On diplomacy : a genealogy of Western estrangement*. New York: B. Blackwell.
- Drahos, P., & Braithwaite, J. (2004). Hegemony Based on Knowledge: The Role of Intellectual Property. *Law in Context*, 21(1).
- Duchacek, I. (1990). Perforated Sovereignties: Towards a Typology of a New Actors in International Relations. In Michelmann H. and Soldatos P. (Ed.), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (1st ed., p. 327). Oxford: Oxford University Press.

- Effendi, T. D. (2011). *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*. Ghalia Indonesia.
- Feyerabend, P. (2010). *Against method* (4th ed.). Verso Books.
- Ham, P. van. (2010). *Social power in international politics* (1st ed.). New York: Routledge.
- Hampton, T. (2009). *Fictions of Embassy: Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*.
- Heine, J. (2006, October). *On the Manner of Practising the New Diplomacy*. Ontario: The Centre for International Governance Innovation.
- Hermawan, Y. P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu, dan Metodologi* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Holsti, K. J. (1995). *International politics : a framework for analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- James, A. (1993). *Diplomacy*. *Review of International Studies*, 19(1), 91–100. <https://doi.org/10.1017/S026021050011736X>
- Kissinger, H. (1994). *Diplomacy*. Simon & Schuster (2nd ed.).
- Klepper, G. (2018). *Winners and losers from the EU's proposed ban on palm oil | Opinion | Eco-Business | Asia Pacific*. Retrieved from <https://www.eco-business.com/opinion/winners-and-losers-from-the-eus-proposed-ban-on-palm-oil/>
- Koselleck, R. (2004). *Futures past : on the semantics of historical time*. Columbia University Press.
- Krasner, S. D. (2001). *Sovereignty : Organized Hypocrisy*. Princeton University Press.

- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy : Subnational Governments in International Affairs*. Routledge.
- Leguey-Feilleux, J.-R. (2009). *The dynamics of diplomacy* (1st ed.). Lynne Rienner Publishers.
- Lembaga Survei Indonesia. (2020). Persepsi Publik terhadap Negara-Negara Paling Berpengaruh di Asia.
- Lequesne, C., & Paquin, S. (2017). Federalism, Paradiplomacy and Foreign Policy: A Case of Mutual Neglect, 183–204.
- McDonald, J. W. (2012). The Institute for Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology*, 3(2). <https://doi.org/10.7238/joc.v3i2.1629>
- Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (pp. 3–27). London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230554931_1
- Melissen, J. (2011a). Beyond the New Public Diplomacy. Clingendael Institute. <https://doi.org/10.2307/resrep05355>
- Melissen, J. (2011b). *Public Diplomacy and Soft Power in East Asia*. (S. J. Lee & J. Melissen, Eds.) (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9780230118447>
- Minix, D. A., & Hawley, S. (1997). *Global politics*. West Pub.
- Mitchell, J. M. (1986). *International Cultural Relations* (1st ed.). London: Taylor & Francis Ltd.
- Morgenthau, H. (1967). *Politics among nations the struggle for power and peace* (4th ed.). New York: Knopf.

- Murray, S., Sharp, P., Wiseman, G., Criekemans, D., & Melissen, J. (2011). The Present and Future of Diplomacy and Diplomatic Studies. *International Studies Review*. WileyThe International Studies Association. <https://doi.org/10.2307/41428877>
- Nau, H. R. (2009). *Perspectives on international relations : power, institutions, and ideas* (2nd ed.). Washington: CQ Press.
- Nisbett, M. (2013). New perspectives on instrumentalism: an empirical study of cultural diplomacy. *International Journal of Cultural Policy*, 19(5), 557–575. <https://doi.org/10.1080/10286632.2012.704628>
- Nisbett, M. (2016). Who Holds in the Power in Soft Power? *Arts & International*, 1(1). <https://doi.org/10.18278/aia.1.1.7>
- Nye, J. S. (2011). *The future of power*. PublicAffairs.
- OULDRAAT, C. D. J., & SIMMONS, P. J. (1999). Civil Society, the United Nations, and Global Governance.
- Popović, M. (2017). The Roles and Practices of Fashion in Cultural Diplomacy. In Milena Dragičević Šešić (Ed.), *Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics* (1st ed., pp. 251–262). Belgrade: Creative Europe Desk Serbia and Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
- Price, R. M. (Ed.). (2010). *Moral Limit and Possibility in World Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755897>
- Putnam, F. W. (1989). Pierre Janet and modern views of dissociation. *Journal of Traumatic Stress*, 2(4), 413–429. <https://doi.org/10.1002/jts.2490020406>

- Putnam, R. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 41(3).
- Putnam, R. D. (1993). What makes democracy work? *National Civic Review*, 82(2), 101–107. <https://doi.org/10.1002/ncr.4100820204>
- Rachmawati, I. (2018). *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Internasional* (1st ed.). Yogyakarta: Calpulis.
- Ritschel, C. (2018). The reasons why palm oil is so controversial | The Independent. Retrieved from <https://www.independent.co.uk/life-style/palm-oil-health-impact-environment-animals-deforestation-heart-a8505521.html>
- Roberts, A., & Kingsbury, B. (1993). *United Nations, divided world : the UN's roles in international relations*. Clarendon Press.
- Satow, E. (2011). *A Guide to Diplomatic Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511995194>
- Schneider, C. P. (2010). Cultural Diplomacy: The Humanizing Factor. In Singh J.P. (Ed.), *International Cultural Policies and Power* (1st ed., pp. 101–112). London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230278011_9
- Seib, P. (2009). Conclusion: The Task for Policy Makers. In *Toward a New Public Diplomacy* (pp. 239–246). New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230100855_12
- Seib, P. M. (2009). *Toward a new public diplomacy : redirecting U.S. foreign policy*. Palgrave Macmillan.
- Seneca. (1913). *De Otio*. (J. W. Basore, Ed.) (1st ed.). Heinemann.

- Serhan, A. (2017). Cultural Diplomacy: From Showcase to Intercultural Dialogue dalam Europe & Serbia. In Milena Dragičević Šešić (Ed.), *Diplomacy. Arts, Festivals and Geopolitics* (1st ed., pp. 51–60). Belgrade: Creative Europe Desk Serbia and Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
- Sharp, P. (2005). Revolutionary States, Outlaw Regimes and the Techniques of Public Diplomacy BT - The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. In J. Melissen (Ed.) (pp. 106–123). London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230554931_6
- Sizov, S. (2019). Big Research Infrastructures for Diplomacy and Global Engagement through Science (BRIDGES) - BRIDGES - IIASA. Retrieved January 14, 2020, from <https://www.iiasa.ac.at/web/home/diplomacy/bridges.html>
- Skinner, B. F. (1990). Can psychology be a science of mind? *American Psychologist*, 45(11), 1206–1210. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.11.1206>
- Snow, N., & Cull, N. J. (2009). *Routledge Handbook Of Public Diplomacy*. (2nd Ed.). Abingdon: Routledge.
- Soldatos, P. (1990). An Explanatory Framework for the Study of Federal States as Foreign-policy Actors. In H. Michelmann & P. Soldatos (Eds.), *Federalism and International Relations: the Role of Subnational Units*. Oxford. Claredon Press.
- Statista Research Departement. (2019). Indonesia: Smartphone User Penetration 2019.

- UN. Secretary-General. (1997, October). *Renewing the United Nations : : a programme for reform*. UN.
- UN SDG. (2012). United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20 .. Sustainable Development Knowledge Platform. Retrieved January 14, 2020, from <https://sustainabledevelopment.un.org/rio20>
- UNCTAD Series. (2001). *United Nations Conference On Trade And Development UNCTAD Series on issues in international investment agreements United Nations Transfer Of Technology Internet edition*.
- Vaughan, J. R. (2005). 'A Certain Idea of Britain': British Cultural Diplomacy in the Middle East, 1945–57. *Contemporary British History*, 19(2), 151–168. <https://doi.org/10.1080/13619460500080215>
- Wang, J. (2006). Localising public diplomacy: The role of sub-national actors in nation branding. *Place Branding*, 2(1), 32–42. <https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990043>